



2019

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2019



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUM KLHK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Seluruh pemegang izin lingkungan menaati peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	650 izin
2.	Meningkatnya Hak-Hak Negara atas Produksi Hasil Hutan	Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	120 Kasus (P-21)
3.	Meningkatkan kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	2.675.000 Ha

No.

Program/ Kegiatan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH).
3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggaran(x Rp.1000,-)
443.634.941

Jakarta, Desember 2018

MENTERI
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITHURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN

Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si

Jabatan : Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Pihak Pertama,
Direktur Penanganan Pengaduan,
Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP 19681209 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN dan SANKSI ADMINISTRASI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	100 % dari Pengaduan yang masuk (375 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	265 Izin
		Penerapan Sanksi Administrasi	100 Sanksi
		Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi di DAS Citarum	50 Perusahaan
		Sarana prasarana pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi

Anggaran Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp 2.228.400.000,-
2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Rp 32.800.000.000,-
Rp 35.028.400.000,-

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
 Direktur Penanganan Pengaduan,
 Pengawasan dan Sanksi Administrasi



Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si
 NIP 19681209 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin Ragil Utomo, SH, MM

Jabatan : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup,

Jasmin Ragil Utomo, SH, MM

NIP. 19640603 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Gugatan Perdata Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan	7 Gugatan
		Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di Luar Pengadilan dalam bentuk Kesepakatan.	20 Kasus
		Gugatan Perdata Lingkungan Hidup Terkait DAS Citarum Melalui Pengadilan	3 Gugatan
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Rp. 1.994.050.000,-

Rp. 16.847.223.000,-

Total Anggaran

Rp. 18.841.273.000,-

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK,



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,



Jasmin Ragil Utomo, SH, MM

NIP. 19640603 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Sustyo Iriyono, M.Si

Jabatan : Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Hutan

Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	320.000 Ha
		Luas hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi	5.000 Ha
		Sarana, prasarana, dan kapasitas polisi kehutanan dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan dukungan manajemen satker	1 Layanan
		Layanan perkantoran	1 Layanan

Kegiatan:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan; | Rp. 31.450.000.000 |
| 2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; | Rp. 2.355.480.000 |

Total Anggaran **Rp. 33.805.480.000**

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Hutan



Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
NIP. 19620621 199002 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Nurhuda, S.H., M.A

Jabatan : Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP 19681209 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P21	7 Kasus (P-21)
		Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum	1 Kasus (P-21)
		Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang Memenuhi Standar Minimum	1 Lokasi

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 2.094.779.000,-
2. Penegakan Hukum Pidana dan Kehutanan Rp. 14.961.219.000,-

Total Anggaran

Rp. 17.055.990.000.-

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum Pidana,



Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP 19681209 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Kemal Amas, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Ir. Kemal Amas., M.Sc
NIP. 19590725 198603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edward Sembiring, S.Hut, M.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai PPHLHK Sumatera,

Edward Sembiring, S.Hut, M.Si
NIP. 19730530 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN SUMATERA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	12 Layanan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun	675.000 Hektar
		Sarana dan Prasarana pelaksanaan pencegahan dan pengamanan hutan yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan masyarakat yang masuk tertangani	100% dari Pengaduan yang Masuk (250 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	125 Izin
		Sarana prasarana pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkaranya dinyatakan lengkap)	35 kasus P-21
		Sarana dan prasarana penegakan hukum pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi


Kegiatan :

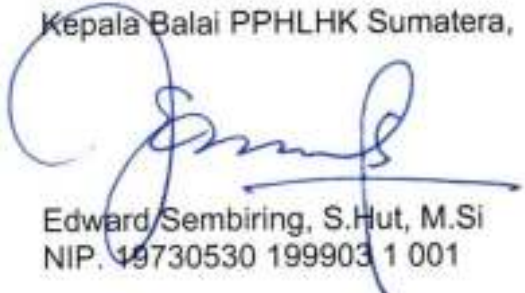
1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK	Rp.27.374.432.000
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan;	Rp.22.500.000.000
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;	Rp. 9.000.000.000
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Rp.14.550.000.000
Total Anggaran	Rp.73.424.432.000

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Pihak Pertama,
 Kepala Balai PPHLHK Sumatera,


 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018


 Edward Sembiring, S.Hut, M.Si
 NIP. 19730530 199903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subhan, S.Hut., M.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPHLHK Kalimantan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Subhan S.Hut., M.Si
NIP 19730320 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	450.000 Hektar
		Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
2	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	100% dari Pengaduan yang Masuk (150 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	75 Izin
		Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
3	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	33 Kasus P-21
		Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan; | Rp. 20.000.000.000 |
| 2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; | Rp. 5.650.000.000 |
| 3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. | Rp. 14.050.000.000 |
| 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 20.740.151.000 |

Total Anggaran

Rp. 60.440.151.000

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,
 Kepala Balai PPHLHK
 Kalimantan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP 19660711 199203 1 018



Subhan, S.Hut., M.Si
 NIP 19730320 199903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPHLHK
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc
NIP 19640307 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN JAWA BALI NUSA TENGGARA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan dukungan manajemen satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	499.000 Hektar
		Luas Hutan DAS Citarum yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patrol dan operasi	1.000 Hektar
		Sarana dan Prasarana pelaksanaan pencegahan dan pengamanan hutan yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	100% dari Pengaduan yang Masuk (225 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	125 ijin
		Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi di DAS Citarum	40 Perusahaan
		Sarana prasarana pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	15 Kasus P-21
		Penyelesaian Kasus Pidana LHK di DAS Citarum	2 Kasus P-21
		Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi

Kegiatan :

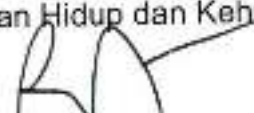
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Anggaran

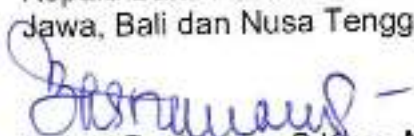
Rp. 61.862.516.000,-

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan


 Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,
 Kepala Balai PPHLHK
 Jawa, Bali dan Nusa Tenggara


 Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc
 NIP 19640307 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Muhammad Nur, MSP

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPHLHK Sulawesi,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Ir. Muhammad Nur, MSP
NIP. 19670727 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	375.000 Ha
		Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
2.	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	100% dari Pengaduan yang Masuk (110 Pengaduan)
		Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	60 Ijin
		Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
3.	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	22 Kasus (P-21)
		Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan manajemen Satker	1 layanan
		Layanan Perkantoran	12 Layanan

Kegiatan:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan; | Rp. 20.500.727.000,- |
| 2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; | Rp. 4.506.520.000,- |
| 3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan; | Rp. 10.000.000.000,- |
| 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. | Rp. 17.863.446.000,- |

Total Anggaran

Rp. 52.870.693.000,-

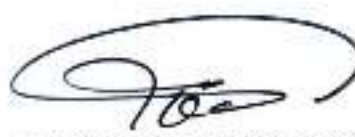
Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPHLHK Jabalnusra,



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018



Ir. Muhammad Nur, MSP
NIP 19670727 199703 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.G. Martana, S.HuT., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Kepala Balai PPHLHK Maluku Papua,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

A.G. Martana, s.HuT., M.H.
NIP 19721002 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH MALUKU PAPUA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	350.000 Ha
		Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan	1 Lokasi
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	100% dari Pengaduan yang Masuk (90 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	25 Izin
		Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1 Lokasi
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	10 Kasus P-21
		Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK	1 Lokasi

Kegiatan:

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan;
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Total Anggaran :

Rp. 43.672.713.000,-

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

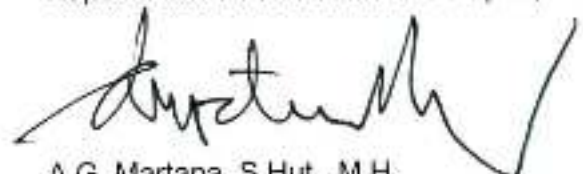


Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP 19660711 199203 1 018

Jakarta, Desember 2018

Pihak Pertama,

Kepala Balai PPHLHK Maluku Papua,



A.G. Martana, S.Hut., M.H.
 NIP 19721002 199903 1 001



K e m e n t e r i a n L i n g k u n g a n H i d u p
d a n K e h u t a n a n

2 0 1 9